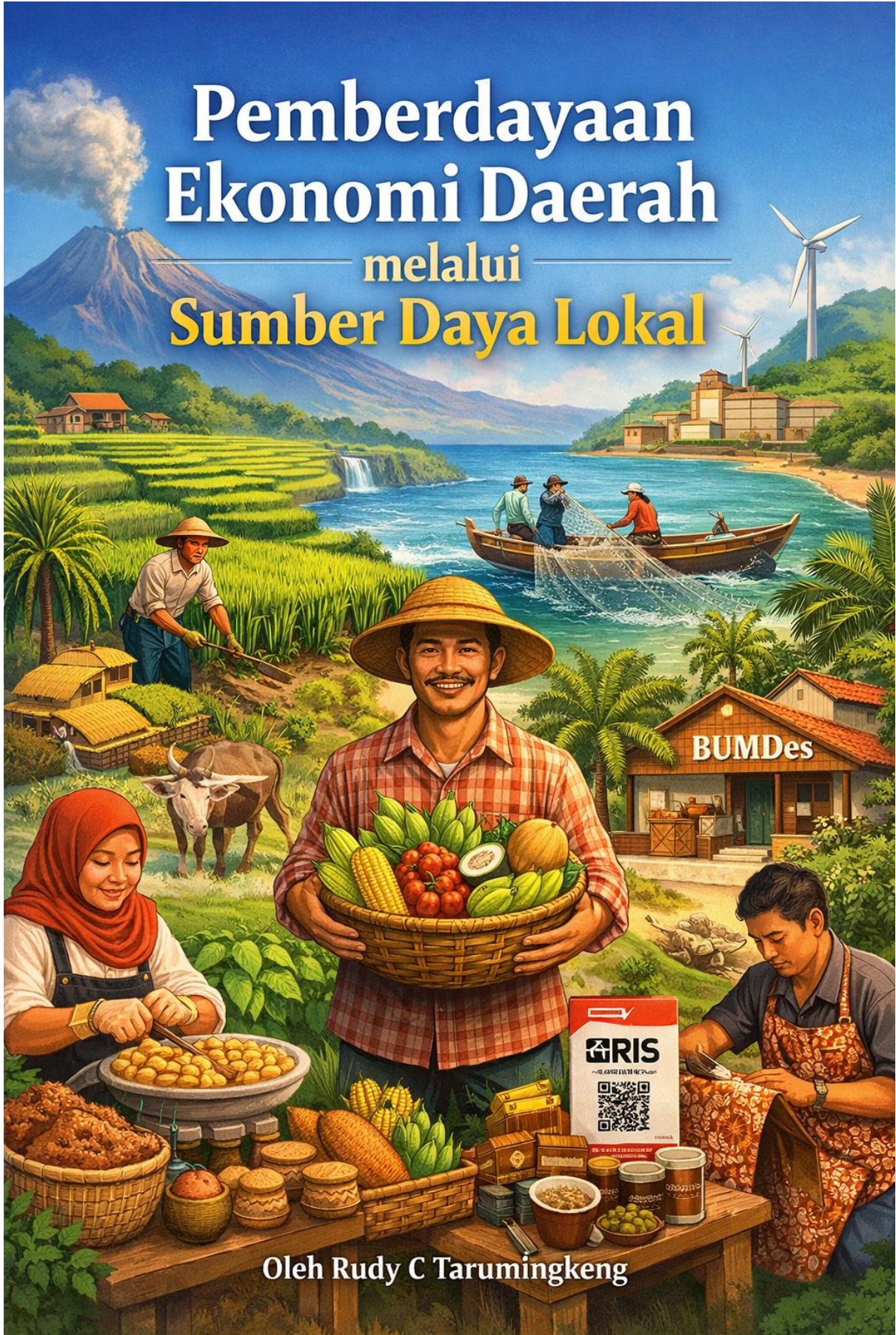


Pemberdayaan Ekonomi Daerah melalui Sumber Daya Lokal



Oleh Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

2 Maret 2026

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH MELALUI SUMBER DAYA LOKAL

1. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi daerah melalui sumber daya lokal merupakan salah satu agenda paling penting dalam pembangunan Indonesia kontemporer. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa pertumbuhan nasional tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan di semua wilayah. Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia masih 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Yang lebih penting untuk dicermati, kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi, yaitu 10,72 persen, dibandingkan perkotaan 6,60 persen. Pada saat yang sama, gini ratio September 2025 tercatat 0,363; angka ini memang membaik dibandingkan Maret 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan transfer fiskal atau proyek dari atas, melainkan harus membangun mesin pertumbuhan dari dalam wilayah itu sendiri. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks itulah sumber daya lokal menjadi penting. Sumber daya lokal bukan hanya tanah, air, laut, hutan, tambang, atau komoditas pertanian. Ia juga mencakup keterampilan masyarakat, tradisi produksi, pengetahuan turun-temurun, jejaring sosial, identitas budaya, kelembagaan lokal, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Ketika semua unsur ini dipadukan secara produktif, maka daerah tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi pusat pertumbuhan lain, tetapi menjadi pencipta nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan yang berkelanjutan. Perspektif ini selaras dengan Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa mencakup pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat setempat. ([JDIH Kementerian Desa](#))

Secara akademik, pemberdayaan ekonomi daerah dapat dipahami sebagai proses memperbesar kapasitas masyarakat dan institusi lokal untuk mengelola aset wilayahnya, mengambil keputusan ekonomi secara mandiri, serta memperoleh manfaat yang lebih adil dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemberdayaan berarti daerah tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang mengenali potensi, merumuskan strategi, membangun organisasi ekonomi, dan menegosiasikan pasar. Karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak identik dengan bantuan sesaat; ia lebih dekat dengan pembangunan kapabilitas, penguatan kelembagaan, perluasan akses pasar, dan penciptaan ekosistem nilai tambah. Kerangka seperti ini juga tampak dalam pendekatan proyek pengembangan rantai nilai pertanian ICARE yang menekankan penilaian peluang pasar spesifik lokasi, identifikasi kesenjangan infrastruktur, teknologi, dan keterampilan, serta penyusunan rencana agribisnis berbasis kolaborasi pemerintah, swasta, dan kelompok tani. ([World Bank](#))

Dengan demikian, pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi daerah melalui sumber daya lokal sesungguhnya adalah pembahasan tentang transformasi: bagaimana kekayaan lokal diubah menjadi kesejahteraan lokal. Pertanyaannya bukan semata "apa yang dimiliki daerah," tetapi "bagaimana daerah mengolah, melindungi, memasarkan, dan mendistribusikan manfaat dari apa yang dimilikinya." Di sini letak tantangan sekaligus peluang Indonesia sebagai negara kepulauan

dengan keragaman hayati, budaya, dan ekonomi yang sangat besar. RPJMN 2025–2029 sendiri menempatkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan potensi lokal, pendidikan vokasi di bidang pertanian-perkebunan-industri pengolahan, serta pengembangan desa wisata dan produk unggulan desa sebagai bagian dari sasaran pembangunan. (perpustakaan.bappenas.go.id)

2. Mengapa sumber daya lokal harus menjadi fondasi pembangunan daerah

Ada beberapa alasan mendasar mengapa sumber daya lokal harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah. Pertama, struktur wilayah Indonesia sangat beragam. Basis ekonomi daerah pesisir berbeda dari daerah pegunungan; kabupaten penghasil kopi berbeda dari kabupaten penghasil ikan; daerah dengan warisan budaya kuat berbeda dari daerah dengan keunggulan logistik atau energi. Karena itu, pendekatan pembangunan yang seragam cenderung menghasilkan kebijakan yang kurang pas sasaran. Pendekatan berbasis sumber daya lokal memungkinkan strategi yang lebih place-based, yaitu menyesuaikan desain pembangunan dengan karakter sosial-ekologis dan ekonomi setempat. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penilaian rantai nilai spesifik lokasi yang dalam proyek ICARE dipakai untuk mengidentifikasi peluang pasar dan celah intervensi di setiap kluster pertanian. (World Bank)

Kedua, pemberdayaan berbasis sumber daya lokal lebih berpotensi menciptakan efek pengganda di wilayah sendiri. Bila komoditas lokal hanya dijual sebagai bahan mentah, sebagian besar nilai tambah akan dinikmati pelaku di luar daerah: pengolah, distributor besar, merek nasional, atau pasar ekspor. Sebaliknya, bila daerah mampu mengolah, mengemas, mensertifikasi, memasarkan, dan menautkan komoditasnya ke industri kreatif, pariwisata, atau platform digital, maka mata rantai manfaat akan lebih panjang di dalam wilayah. Pendapatan petani naik,

tenaga kerja terserap di unit pengolahan, transportasi lokal bergerak, kemasan dan desain tumbuh, pajak dan retribusi meningkat, bahkan identitas daerah ikut menguat. Itulah logika dasar hilirisasi lokal. World Bank juga menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang Indonesia sangat terkait dengan reformasi produktivitas, efisiensi, dan daya saing agar sumber daya dapat berpindah ke kegiatan dan perusahaan yang lebih produktif serta bernilai tambah lebih tinggi. ([World Bank Docs](#))

Ketiga, sumber daya lokal memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa aset ekonomi itu “milik kita” secara budaya, historis, atau ekologis, maka ada dorongan yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutannya. Kita dapat melihat hal ini pada skema perhutanan sosial, di mana akses legal kelola diberikan kepada masyarakat setempat sehingga tujuan konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Pendekatan demikian penting karena pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi harus memastikan sumber penghidupan tetap lestari bagi generasi berikutnya. ([Ministry of Environment and Forestry](#))

Keempat, pemberdayaan berbasis sumber daya lokal memperkuat resiliensi ekonomi daerah. Daerah yang hanya mengandalkan satu sumber penerimaan eksternal biasanya lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan logistik, atau perubahan kebijakan pusat. Sebaliknya, daerah yang membangun beragam kegiatan berbasis aset lokal—misalnya pertanian olahan, wisata berbasis budaya, energi desa, UMKM digital, dan koperasi—akan lebih lentur menghadapi guncangan. Dalam bahasa manajemen strategis, pemberdayaan lokal memperbesar kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui diversifikasi, inovasi, dan kolaborasi institusional. Ketika pertumbuhan nasional 2025 tercatat 5,11 persen dan diperkirakan tetap berlanjut pada 2026, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana menjaga angka pertumbuhan,

tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan itu berakar pada basis produksi lokal yang tangguh. ([Bank Indonesia](#))

3. Apa yang dimaksud dengan sumber daya lokal

Sering kali orang membayangkan sumber daya lokal hanya sebagai sumber daya alam. Pandangan ini terlalu sempit. Dalam kerangka pembangunan daerah modern, setidaknya ada lima kelompok sumber daya lokal yang perlu dikenali.

Pertama, sumber daya alam: lahan pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, pesisir, energi terbarukan, dan keanekaragaman hayati. Ini adalah fondasi material ekonomi daerah. Banyak wilayah Indonesia memiliki komoditas unggulan yang sangat khas: kopi, rempah, pala, cengkeh, kelapa, kakao, garam, ikan, rumput laut, madu hutan, dan seterusnya. Tetapi nilai strategisnya baru muncul jika sumber daya itu dihubungkan dengan teknologi, kelembagaan, dan pasar. Bappenas, misalnya, menempatkan hilirisasi kelapa 2025–2045 sebagai agenda strategis pengolahan komoditas unggulan perkebunan. Dalam sektor kelautan, KKP juga mendorong implementasi ekonomi biru oleh pemerintah daerah untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Kedua, sumber daya manusia lokal: keterampilan produksi, kemampuan kewirausahaan, pengalaman bertani atau melaut, disiplin kerja, kreativitas anak muda, dan kapasitas manajerial aparatur maupun organisasi ekonomi setempat. Sering kali daerah kaya komoditas tetapi miskin kapasitas pengolahan, pengemasan, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital. Karena itu RPJMN 2025–2029 menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, khususnya yang mendukung potensi lokal di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. World Bank juga menekankan perlunya investasi dalam human capital dan skills untuk mendorong produktivitas. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Ketiga, sumber daya sosial dan kelembagaan: gotong royong, kepercayaan, norma bersama, koperasi, kelompok tani, asosiasi nelayan, BUMDes, kelompok usaha perhutanan sosial, dan forum multipihak. Tanpa kelembagaan, sumber daya ekonomi akan terfragmentasi. Petani menjual sendiri-sendiri, skala menjadi kecil, posisi tawar lemah, kualitas tidak seragam, dan akses pembiayaan sulit. Itulah sebabnya proyek ICARE memberi perhatian besar pada penguatan farmer groups, farmer cooperatives, dan Korporasi Petani, sementara regulasi desa dan Dana Desa juga menekankan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi dan keunggulan desa. Bahkan dalam skema terbaru, Kemendesa mendorong sinergi antara BUMDes dan koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, melainkan integrasi kelembagaan ekonomi desa. ([World Bank](#))

Keempat, sumber daya budaya dan identitas wilayah. Produk lokal yang kuat biasanya tidak hanya menjual fungsi, tetapi juga cerita: asal-usul, tradisi, lanskap, rasa, teknik produksi, dan kebanggaan kolektif. Di sini konsep indikasi geografis menjadi penting. DJKI mencatat banyak produk unggulan daerah telah terdaftar sebagai indikasi geografis, seperti Kopi Arabika Kintamani Bali, Cengkeh Minahasa, Pala Siau, Kopi Robusta Lampung, Gula Kelapa Kulonprogo, Tenun Ikat Sikka, dan lain-lain. Perlindungan seperti ini mengubah identitas daerah menjadi aset ekonomi yang terlindungi dan bernilai pasar. ([dgip.go.id](#))

Kelima, sumber daya digital. Dalam ekonomi modern, akses ke pasar tidak lagi semata bergantung pada kedekatan geografis. Konektivitas internet, pembayaran digital, platform niaga, katalog elektronik, promosi media sosial, dan data transaksi telah menjadi sumber daya ekonomi baru. Bank Indonesia menegaskan bahwa QRIS diarahkan sebagai entry point bagi UMKM ke ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Pada 2025, pembayaran digital dan pertumbuhan transaksi QRIS menunjukkan ekosistem ini makin luas; BI juga mencatat sekitar 40 juta merchant telah memakai QRIS dan 92

persen di antaranya adalah UMKM lokal. Dengan kata lain, digitalisasi bukan tambahan, tetapi bagian dari infrastruktur pemberdayaan ekonomi daerah. ([Bank Indonesia](#))

4. Dari potensi ke nilai tambah: bagaimana transformasi itu terjadi

Pertanyaan pokok dalam pemberdayaan ekonomi daerah bukan sekadar bagaimana “mengambil” manfaat dari sumber daya lokal, tetapi bagaimana “mentransformasikan” sumber daya itu menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Transformasi ini biasanya melalui lima tahap: identifikasi potensi, pengorganisasian pelaku, peningkatan kualitas produksi, pengolahan dan diferensiasi, lalu perluasan pasar. Pada tahap identifikasi, daerah harus jujur membaca keunggulan dan keterbatasannya: komoditas apa yang benar-benar kuat, apa hambatan utamanya, siapa aktor kuncinya, bagaimana permintaan pasarnya, dan infrastruktur apa yang paling mendesak. Pendekatan site-specific value chain assessment dalam ICARE sangat relevan di sini karena menilai peluang pasar dan kesenjangan di setiap kluster secara partisipatif. ([World Bank](#))

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian pelaku. Banyak kegagalan ekonomi lokal terjadi bukan karena komoditasnya buruk, tetapi karena aktornya tercerai-berai. Petani tidak tergabung dalam kelembagaan yang kuat, pengrajin bekerja sendiri, nelayan tidak punya agregator yang adil, dan pemerintah daerah bergerak parsial. Karena itu, kelembagaan ekonomi—koperasi, BUMDes, kelompok tani, asosiasi produsen, KUPS—menjadi jantung pemberdayaan. Kelembagaan yang sehat membuat pembelian input lebih efisien, standardisasi lebih mudah, volume pasokan lebih pasti, akses kredit lebih terbuka, dan negosiasi harga lebih kuat. Di desa, Dana Desa dan regulasi turunannya memberi ruang besar untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa, ketahanan pangan, desa digital, serta pembangunan padat karya berbasis bahan baku lokal. ([djpk.kemenkeu.go.id](#))

Setelah kelembagaan menguat, transformasi menuntut peningkatan kualitas produksi. Di sinilah peran teknologi, pelatihan, standardisasi, riset terapan, dan pendampingan menjadi penting. Produk lokal sering kalah bukan karena tidak bagus, tetapi karena kualitasnya tidak seragam, tidak ada jaminan mutu, atau tidak memenuhi standar pasar modern. ICARE memasukkan layanan seperti soil testing, disease identification, quality assurance, dan equipment calibration sebagai bagian dari dukungan rantai nilai. Ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal modern tidak bisa dibangun hanya dengan romantisme “produk asli daerah”; ia harus berdiri di atas mutu, efisiensi, dan adaptasi teknologi. ([World Bank](#))

Tahap berikutnya adalah pengolahan dan diferensiasi. Inilah inti hilirisasi. Kelapa tidak cukup dijual sebagai butir segar; ia bisa menjadi santan, minyak kelapa murni, arang aktif, cocopeat, serat, gula kelapa, produk pangan, bahkan bahan kosmetik. Ikan tidak hanya dijual mentah; ia bisa menjadi fillet, ikan asap, abon, frozen food, atau produk kuliner khas. Hasil hutan bukan kayu tidak hanya dipanen; ia bisa diolah menjadi madu premium, minyak atsiri, kopi hutan, atau jasa wisata alam. Dengan pengolahan, daerah memperoleh margin nilai yang lebih besar, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan memperpanjang umur ekonomi komoditasnya. Karena itu hilirisasi komoditas unggulan—seperti yang ditegaskan dalam peta jalan hilirisasi kelapa Bappenas—perlu dipahami sebagai strategi pemberdayaan daerah, bukan sekadar strategi industri nasional. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Tahap terakhir adalah perluasan pasar. Produk lokal harus bertemu pasar yang tepat melalui logistik, branding, sertifikasi, promosi, event, digital commerce, dan ekosistem pembayaran. Di sinilah QRIS, platform digital, dan perlindungan indikasi geografis menjadi pengungkit penting. Produk yang memiliki identitas geografis kuat dapat masuk ke pasar premium, sementara pembayaran digital memudahkan UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas dan mencatat transaksi secara lebih profesional. Bank Indonesia menekankan bahwa QRIS menjadi

pintu masuk UMKM ke ekosistem digital; artinya, digitalisasi transaksi dapat menjadi langkah awal menuju manajemen usaha yang lebih tertib dan bankable. ([Bank Indonesia](#))

5. Peran negara, pemerintah daerah, dan desa

Pemberdayaan ekonomi daerah tidak akan berjalan jika dibebankan sepenuhnya kepada pasar. Negara dan pemerintah daerah tetap memegang peran sentral, tetapi perannya harus bergeser dari “pelaku tunggal” menjadi “orkestrator ekosistem.” Negara menetapkan arah, regulasi, insentif, perlindungan, dan infrastruktur dasar; daerah mengorganisasi aktor dan menyesuaikan strategi; masyarakat dan pelaku usaha menjalankan inovasi di lapangan. Model ini lebih realistis dibandingkan pendekatan lama yang terlalu birokratis atau terlalu menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar.

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Desa memberikan fondasi kuat karena pembangunan desa dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Bahasa hukum ini penting, sebab ia menegaskan bahwa ekonomi lokal bukan isu tambahan, melainkan bagian inheren dari pembangunan desa. Dengan kata lain, desa tidak boleh hanya dipandang sebagai lokasi administrasi, tetapi sebagai unit ekonomi yang memiliki hak membangun masa depannya sendiri. ([JDIH Kementerian Desa](#))

Secara fiskal, Dana Desa merupakan instrumen yang sangat strategis. PMK Nomor 108 Tahun 2024 menetapkan pagu Dana Desa TA 2025 sebesar Rp71 triliun. Penggunaannya diutamakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, desa adaptif terhadap perubahan iklim, layanan kesehatan skala desa, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa. Penjelasan lebih lanjut dari DJPb juga menunjukkan bahwa pada 2025 Dana Desa diarahkan untuk desa digital,

padat karya tunai, dan penggunaan bahan baku lokal. Artinya, secara desain kebijakan, negara sesungguhnya telah menyediakan instrumen yang memungkinkan ekonomi lokal tumbuh, asalkan pemerintah desa dan kabupaten mampu merencanakan, mengawasi, dan mengeksekusinya secara baik. (djpk.kemenkeu.go.id)

Namun, besarnya dana tidak otomatis berarti besarnya dampak. Tantangan implementasi tetap berat: kapasitas aparatur desa yang beragam, kualitas perencanaan yang belum merata, keterbatasan data, serta risiko penyalahgunaan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi daerah memerlukan tata kelola yang disiplin. Dana publik harus dipakai untuk menciptakan aset produktif dan kapasitas ekonomi, bukan hanya belanja habis pakai. Contohnya, desa yang memiliki potensi kelapa dapat memakai Dana Desa untuk penguatan kelembagaan produsen, pelatihan pengolahan, gudang kecil, kemasan, dan promosi digital; desa pesisir dapat memfokuskan belanja pada cold storage skala kecil, pasar ikan higienis, atau rumah produksi olahan; desa wisata dapat memperbaiki akses, sanitasi, pusat informasi, dan pemasaran paket wisata. Logikanya sederhana: transfer fiskal harus berubah menjadi modal produktif lokal. (djpk.kemenkeu.go.id)

Pemerintah daerah kabupaten/kota lalu berperan sebagai penghubung antara desa, pasar, dan kebijakan sektoral. Mereka mesti menyatukan urusan pertanian, perikanan, perindustrian, koperasi, perdagangan, pariwisata, dan energi dalam satu peta jalan ekonomi daerah. Jika tidak, program akan terpecah-pecah: dinas pertanian meningkatkan produksi, dinas perdagangan membuat pameran, dinas koperasi melatih UMKM, tetapi tidak ada satu rantai nilai yang benar-benar tumbuh. Di sinilah konsep klaster dan platform multipihak yang ditekankan ICARE menjadi relevan: semua pihak harus duduk dalam desain agribisnis atau bisnis daerah yang sama, dengan pembagian peran yang jelas. ([World Bank](#))

6. Pertanian, perkebunan, dan pangan lokal sebagai poros utama

Untuk banyak daerah Indonesia, pertanian dan perkebunan tetap menjadi poros pertama pemberdayaan ekonomi. Tetapi tantangannya bukan lagi sekadar meningkatkan produksi primer. Tantangan utamanya adalah bagaimana menghubungkan petani dengan rantai nilai yang lebih menguntungkan. World Bank melalui ICARE menekankan bahwa pengembangan klaster pertanian harus berbasis penilaian peluang pasar spesifik lokasi, partisipasi kelompok tani, dan koordinasi investasi untuk jalan desa, irigasi, listrik, agrologistik, serta penyimpanan. Pendekatan ini penting karena petani kecil sering gagal naik kelas bukan hanya karena teknik budidaya, melainkan karena seluruh ekosistem pendukung tidak tersambung. ([World Bank](#))

Dalam konteks ini, pertanian harus dibaca sebagai sistem, bukan sebagai kebun yang berdiri sendiri. Bila daerah unggul pada kopi, misalnya, maka strategi tidak berhenti pada bibit dan pupuk. Ia harus meliputi pengolahan pascapanen, grading, roasting, cerita asal-usul, pengembangan kafe lokal, wisata kebun, promosi digital, pelatihan barista, hingga sertifikasi geografis. Bila daerah unggul pada kelapa, strategi juga harus meluas dari budidaya ke industri turunan. Bappenas menempatkan hilirisasi kelapa 2025–2045 sebagai langkah strategis pengolahan komoditas unggulan perkebunan, yang pada dasarnya menegaskan bahwa masa depan ekonomi daerah tidak cukup dibangun dari ekspor bahan mentah. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Narasi ini dapat dipahami melalui contoh sederhana. Bayangkan sebuah kabupaten penghasil kelapa yang selama ini menjual buah bulat ke luar daerah. Pendapatan petani relatif stagnan karena harga ditentukan pedagang besar. Jika kabupaten itu mulai membangun rumah produksi bersama, koperasi pengolahan, pelatihan standarisasi, dan merek daerah, maka satu komoditas dapat melahirkan banyak turunan usaha: minyak kelapa, gula semut, sabut olahan, kerajinan, kuliner, bahkan edukasi wisata. Lapangan kerja tumbuh bukan hanya di kebun, tetapi juga pada pengolahan, desain kemasan, logistik, pemasaran, dan layanan

digital. Inilah bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya: menahan lebih banyak nilai tambah di wilayah asal.

Selain itu, pangan lokal juga memiliki dimensi strategis dalam pengendalian inflasi dan resiliensi sosial. Penguatan komoditas pangan lokal, distribusi, dan ekosistem pasarnya berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Bank Indonesia dalam berbagai forum pengendalian inflasi daerah menekankan pentingnya ketersediaan dan stabilitas pangan. Karena itu pemberdayaan ekonomi daerah berbasis pangan tidak boleh dipandang semata sebagai urusan petani, melainkan sebagai bagian dari stabilitas ekonomi lokal dan nasional. ([Bank Indonesia](#))

7. Kelautan, pesisir, dan ekonomi biru

Bagi daerah pesisir dan kepulauan, pemberdayaan ekonomi lokal tidak bisa dilepaskan dari laut. Indonesia memiliki garis pantai panjang, tradisi maritim kuat, dan basis konsumsi ikan yang besar. Namun, seperti halnya sektor pertanian, potensi kelautan sering terjebak pada produksi primer dengan nilai tambah rendah. Nelayan menjual hasil tangkap segar dengan posisi tawar lemah, sementara pengolahan, distribusi, dan branding dikuasai pihak lain. Karena itu KKP mendorong implementasi ekonomi biru di daerah sebagai bagian dari hilirisasi dan swasembada pangan, serta menegaskan pentingnya peran kepala dinas daerah sebagai perpanjangan tangan implementasi. Anggaran prioritas ekonomi biru KKP 2025 juga memperlihatkan fokus pada budidaya laut, pesisir, payau, konservasi, penangkapan ikan terukur, dan pengelolaan sampah laut. ([KKP](#))

Ekonomi biru dalam konteks pemberdayaan daerah seharusnya dibaca sebagai kombinasi antara keberlanjutan dan nilai tambah. Daerah pesisir tidak cukup mengejar volume tangkapan; mereka perlu mengembangkan rantai dingin, rumah olahan, sertifikasi mutu, pemasaran digital, wisata pesisir, dan kemitraan usaha yang adil. Sebuah

kampung nelayan, misalnya, dapat berkembang bukan hanya dari lelang ikan, tetapi dari paket ekonomi terintegrasi: pengolahan ikan asap, abon ikan, wisata kuliner, edukasi nelayan, kerajinan jaring daur ulang, dan pembayaran non-tunai bagi wisatawan. Dengan model seperti itu, ekonomi lokal menjadi lebih beragam dan tidak sepenuhnya tergantung pada musim tangkap.

Lebih jauh lagi, ekonomi pesisir berbasis sumber daya lokal juga menyangkut tata kelola lingkungan. Bila pesisir rusak oleh sampah plastik, abrasi, atau praktik penangkapan merusak, maka ekonomi lokal ikut runtuh. Karena itu pendekatan ekonomi biru relevan justru karena menolak dikotomi sempit antara ekonomi dan konservasi. Laut yang sehat adalah prasyarat ekonomi nelayan yang sehat. Dalam perspektif manajemen, ini berarti daerah harus mengelola pesisir sebagai aset jangka panjang, bukan sekadar ruang ekstraksi sesaat. Agenda pengelolaan sampah laut, budidaya berkelanjutan, dan konservasi kawasan laut yang didorong KKP menunjukkan arah tersebut.

ppid.kkp.go.id

8. Hutan, agroforestry, dan perhutanan sosial

Salah satu contoh paling menarik dari pemberdayaan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal adalah perhutanan sosial. Selama bertahun-tahun, kawasan hutan sering dipersepsikan sebagai wilayah negara yang jauh dari masyarakat, padahal masyarakat sekitar hutan justru hidup paling dekat dengan sumber daya tersebut. Melalui perhutanan sosial, pemerintah memberi akses kelola kepada masyarakat dengan tujuan agar konservasi lingkungan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. KLHK/ Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa melalui skema ini masyarakat dapat memiliki akses kelola yang lebih setara, dan pengelolaan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan. (Ministry of Environment and Forestry)

Data resmi menunjukkan skala program ini tidak kecil. Hingga 2024/2025, akses pengelolaan perhutanan sosial telah mencapai sekitar 8,3 juta hektar, melibatkan lebih dari 11 ribu unit persetujuan dan sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Selain itu, sekitar 1,9 juta hektar dicadangkan untuk pengembangan agroforestry pangan. Ini berarti perhutanan sosial bukan program pinggiran, melainkan salah satu basis penting pemerataan ekonomi. Lebih penting lagi, masyarakat yang mendapat akses tersebut membentuk unit bisnis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan komoditas hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ([Ministry of Environment and Forestry](#))

Secara substantif, perhutanan sosial mengajarkan satu hal penting: pemberdayaan ekonomi daerah tidak selalu berarti industrialisasi berat. Dalam banyak kasus, pemberdayaan justru berhasil ketika masyarakat diberi hak, kepastian, pendampingan, dan jalur usaha yang jelas untuk mengelola sumber daya yang sudah mereka kenal. Hasil hutan bukan kayu, madu, kopi hutan, rempah, buah hutan, tanaman obat, ekowisata, dan jasa lingkungan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bila ada organisasi, pasar, dan pembiayaan. Model ini juga relevan untuk banyak daerah di Indonesia timur, termasuk wilayah-wilayah yang memiliki bentang alam kuat tetapi infrastruktur industri terbatas.

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, perhutanan sosial penting karena menyatukan tiga sasaran sekaligus: keadilan akses, produktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Bagi daerah, skema ini bisa menjadi basis agenda ekonomi hijau: usaha mikro berbasis hutan, produk non-kayu premium, wisata alam, hingga perdagangan karbon komunitas di masa depan. Namun sekali lagi, keberhasilannya bergantung pada kualitas pendampingan, kelembagaan usaha, dan konektivitas pasar. ([Ministry of Environment and Forestry](#))

9. Identitas budaya, indikasi geografis, dan ekonomi kreatif daerah

Tidak semua pemberdayaan ekonomi daerah harus dimulai dari volume produksi. Banyak daerah justru memiliki keunggulan pada diferensiasi identitas. Produk yang memiliki karakter khas karena faktor alam, manusia, dan tradisi dapat memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi bila dilindungi dan dipasarkan dengan tepat. Di sinilah indikasi geografis menjadi instrumen strategis. DJKI mencatat berbagai produk unggulan Indonesia telah terdaftar sebagai indikasi geografis, mulai dari Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Toraja, Cengkeh Minahasa, Pala Siau, Gula Kelapa Kulonprogo, Tenun Ikat Sikka, hingga Garam Amed Bali. Daftar itu menunjukkan bahwa ekonomi lokal dapat dibangun dari hubungan erat antara wilayah, kualitas, dan reputasi. (dgip.go.id)

Makna ekonominya sangat besar. Ketika suatu produk dilindungi sebagai indikasi geografis, yang dijual bukan hanya benda fisiknya, tetapi juga jaminan keaslian, cerita tempat, standar kualitas, dan warisan budaya. Bagi produsen kecil, hal ini dapat meningkatkan posisi tawar. Bagi pemerintah daerah, ia menjadi alat branding wilayah. Bagi konsumen, ia memberi keyakinan bahwa produk itu memiliki reputasi dan karakteristik yang tidak dapat direplikasi begitu saja di tempat lain. Itulah sebabnya DJKI menekankan bahwa produk unggulan wilayah—seperti kopi arabika Kintamani, batik Pekalongan, dan ukiran Jepara—memiliki potensi besar dikembangkan sebagai identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi. (dgip.go.id)

Contoh naratif yang sangat kuat adalah Andaliman Pulo Samosir. Dalam pemeriksaan substantif pada April 2025, DJKI menjelaskan bahwa andaliman Samosir memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor geografis dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Pejabat daerah menyebutnya sebagai bumbu utama kuliner khas Batak, dan ketua MPIG Andaliman menyatakan bahwa produk tersebut bahkan telah diminati konsumen Eropa, dengan minat pembelian dari Inggris hingga 150 ton per tahun. Kasus ini memperlihatkan bahwa rempah lokal yang sangat spesifik, jika dilindungi dan ditata dengan baik, dapat

berubah dari “bumbu tradisional” menjadi komoditas beridentitas global. (dgip.go.id)

Bagi Sulawesi Utara, logika yang sama dapat dibaca pada Cengkeh Minahasa dan Pala Siau. DJKI mencantumkan kedua produk itu sebagai indikasi geografis terdaftar. Dokumen indikasi geografis lama juga menunjukkan bagaimana Cengkeh Minahasa diposisikan sebagai komoditas premium yang hendak dilindungi dari pencampuran dengan produk luar, sedangkan Pala Siau dicatat sebagai komoditas unggulan yang diusahakan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Ini memberi pelajaran penting: pemberdayaan ekonomi daerah tidak harus selalu menemukan komoditas baru; sering kali yang dibutuhkan adalah melindungi, menata, dan memodernisasi komoditas lama yang sudah menyatu dengan identitas masyarakat. (dgip.go.id)

Di sinilah ekonomi kreatif mengambil peran. Produk lokal yang kuat butuh desain kemasan, cerita merek, fotografi, video, media sosial, festival daerah, dan jejaring penjualan yang menarik. Anak-anak muda daerah dapat menjadi aktor penting di sini. Mereka mungkin tidak bekerja di kebun atau laut secara langsung, tetapi dapat berkontribusi melalui branding, pemasaran digital, desain, dan konten kreatif. Dalam ekonomi daerah modern, kreativitas bukan pelengkap; ia adalah mesin diferensiasi.

10. Desa wisata, pengalaman lokal, dan jasa berbasis komunitas

Sumber daya lokal juga dapat diwujudkan dalam bentuk jasa, terutama pariwisata dan pengalaman berbasis komunitas. RPJMN menempatkan desa wisata dan produk unggulan desa sebagai bagian dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Kementerian Pariwisata pada 2025 juga menekankan fokus pada pengembangan desa wisata, digitalisasi, dan keberlanjutan. Artinya, pariwisata lokal tidak lagi dipahami sebagai proyek event sesaat, tetapi sebagai ekosistem ekonomi yang dapat menghubungkan homestay, kuliner, kerajinan,

pertunjukan budaya, pemandu lokal, transportasi, dan produk UMKM.
(perpustakaan.bappenas.go.id)

Yang menarik, pariwisata berbasis komunitas bekerja baik justru ketika ia bertumpu pada keaslian lokal. Sebuah desa tidak perlu meniru Bali atau Yogyakarta. Ia cukup menonjolkan cerita dan keunikan yang benar-benar dimilikinya: kopi pegunungan, sawah terasering, kuliner rempah, danau, pantai, ritual adat, hutan rakyat, tenun, musik lokal, atau sejarah kolonial. Dalam model seperti itu, nilai ekonomi tidak hanya datang dari "barang" yang dijual, tetapi dari "pengalaman" yang dirasakan pengunjung. Ketika wisatawan menginap di desa, membayar kuliner lokal dengan QRIS, membeli produk indikasi geografis, lalu membagikan pengalamannya di media sosial, terbentuklah siklus promosi dan pendapatan yang kuat bagi komunitas setempat. Kinerja pariwisata Indonesia 2025 yang terus pulih dan penekanan pemerintah pada dampak ekonomi bagi masyarakat lokal menunjukkan ruang yang besar bagi model ini. ([Badan Otorita Borobudur](#))

Namun, desa wisata hanya akan benar-benar memberdayakan bila tata kelolanya baik. Tanpa itu, desa wisata bisa berubah menjadi ruang ekstraksi baru: investor luar mengambil sebagian besar keuntungan, masyarakat lokal hanya menjadi penonton, dan lingkungan terdegradasi. Karena itu desa wisata yang sehat harus menempatkan komunitas sebagai pemilik atau setidaknya pemegang manfaat utama, dengan BUMDes, koperasi, atau asosiasi lokal sebagai pengelola inti. Inilah alasan mengapa sinergi BUMDes dan koperasi yang didorong Kemendesa menjadi relevan juga untuk sektor jasa dan pariwisata. ([JDIH Kementerian Desa](#))

11. Digitalisasi sebagai akselerator, bukan pengganti ekonomi lokal

Salah satu kekeliruan umum adalah menganggap digitalisasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ekonomi lokal. Padahal yang benar, digitalisasi justru dapat menjadi akselerator ekonomi lokal bila dirancang

dengan tepat. Produk khas daerah yang sebelumnya hanya dijual di pasar setempat kini bisa dipromosikan ke kota besar atau luar negeri. Pembayaran digital memudahkan pencatatan, mempercepat transaksi, dan membuka histori usaha yang berguna untuk pembiayaan. Dalam konteks UMKM, BI menempatkan QRIS sebagai pintu masuk ke ekosistem digital, dan perkembangan 2025 menunjukkan pertumbuhan transaksi pembayaran digital yang sangat kuat. Sekitar 40 juta merchant memakai QRIS dengan dominasi UMKM lokal. ([Bank Indonesia](#))

Implikasinya bagi daerah sangat besar. Seorang pengrajin di desa tidak harus menunggu toko besar masuk ke wilayahnya. Seorang petani kopi dapat menjual roasted bean dengan merek sendiri. Sebuah warung kuliner lokal dapat menerima pembayaran non-tunai dari wisatawan. BUMDes dapat mengelola pencatatan usaha dengan lebih rapi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan katalog digital untuk promosi produk unggulan. Semua ini memperpendek jarak antara produsen lokal dan pasar.

Akan tetapi, digitalisasi bukan obat mujarab. Produk yang buruk tidak akan menjadi baik hanya karena dijual online. Karena itu digitalisasi harus datang setelah atau bersamaan dengan peningkatan mutu, legalitas, merek, logistik, dan kapasitas usaha. Di tingkat desa, penggunaan Dana Desa untuk desa digital dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting bukan semata demi modernitas, tetapi agar pelaku ekonomi lokal bisa masuk ke arsitektur pasar baru. ([DJPB Kemenkeu](#))

12. Tantangan nyata dalam pemberdayaan ekonomi daerah

Walaupun potensinya besar, pemberdayaan ekonomi daerah melalui sumber daya lokal menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama adalah jebakan komoditas mentah. Banyak daerah menghasilkan komoditas besar, tetapi sebagian besar nilai tambah diambil di luar wilayah karena pengolahan, pembiayaan, teknologi, dan

jaringan pasar tidak berada di tangan pelaku lokal. Tantangan kedua adalah rendahnya produktivitas dan efisiensi. World Bank menilai Indonesia masih tertinggal dalam efficiency reforms, yang membatasi perpindahan sumber daya ke industri dan perusahaan yang lebih produktif. Ini berlaku juga di level daerah: ekonomi lokal sering terjebak pada usaha kecil berskala mikro yang tidak pernah naik kelas. ([World Bank Docs](#))

Tantangan ketiga adalah kapasitas SDM dan kelembagaan. Banyak aparatur desa dan pelaku usaha lokal belum cukup kuat dalam perencanaan usaha, pembukuan, standardisasi mutu, penggunaan sistem digital, dan pengelolaan organisasi. DJPb dalam ulasan mengenai Dana Desa juga menyoroti keterbatasan kapasitas perencanaan, penggunaan sistem digital, dan pengawasan sebagai hambatan implementasi. Jika kelembagaan lemah, maka transfer dana dan program pendampingan tidak menghasilkan lompatan produktif yang diharapkan. ([DJPB Kemenkeu](#))

Tantangan keempat adalah infrastruktur dan logistik. Jalan desa, irigasi, listrik, cold chain, gudang, internet, dan konektivitas pasar merupakan syarat dasar. ICARE secara eksplisit menempatkan investasi pada jalan perdesaan, irigasi, listrik, agrologistik, storage, dan infrastruktur rural lain sebagai bagian dari pengembangan rantai nilai. Dalam sektor energi, ESDM juga mengakui bahwa meski rasio elektrifikasi nasional telah sangat tinggi, masih ada ribuan desa dan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum terjangkau listrik PLN pada 2025. Artinya, di sejumlah wilayah, ekonomi lokal masih harus bertarung terlebih dahulu dengan masalah infrastruktur dasar. ([World Bank](#))

Tantangan kelima adalah risiko ekologis dan tata kelola. Jika sumber daya lokal dieksploitasi tanpa disiplin, maka fondasi ekonomi daerah justru akan habis. Penangkapan ikan berlebih, pembukaan lahan yang merusak, wisata yang melampaui daya dukung, atau pertambangan yang

mengabaikan lingkungan dapat memberikan pemasukan jangka pendek tetapi menciptakan kemiskinan jangka panjang. Karena itu pemberdayaan berbasis sumber daya lokal harus selalu memasukkan prinsip keberlanjutan, adaptasi iklim, dan tata kelola yang transparan. Fokus Dana Desa 2025 pada desa adaptif terhadap perubahan iklim dan pembangunan berbasis bahan baku lokal sesungguhnya memberi arah yang tepat, tetapi implementasinya harus konsisten.

(djk.kemenkeu.go.id)

13. Agenda strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi daerah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa agenda strategis yang patut ditekankan.

Pertama, setiap daerah perlu menyusun peta ekonomi lokal berbasis rantai nilai, bukan hanya daftar komoditas unggulan. Daerah harus menjawab: siapa produsen utamanya, bagaimana mutu produknya, di mana titik hilirisasi yang paling realistis, infrastruktur apa yang hilang, pasar mana yang dituju, dan institusi lokal mana yang akan memimpin. Pendekatan seperti ICARE—yang memulai dari penilaian peluang pasar spesifik lokasi dan kesenjangan keterampilan, teknologi, serta infrastruktur—dapat dijadikan rujukan metodologis. ([World Bank](#))

Kedua, perkuat kelembagaan ekonomi lokal. Koperasi, BUMDes, kelompok tani, KUPS, asosiasi pengrajin, dan agregator lokal harus dibangun bukan sebagai formalitas proyek, melainkan sebagai organisasi bisnis yang hidup. Sinergi BUMDes dan koperasi yang didorong Kemendesa perlu diterjemahkan secara kreatif di lapangan, misalnya BUMDes mengelola unit usaha dan koperasi menjadi payung transaksi, pembiayaan, serta distribusi. ([JDIH Kementerian Desa](#))

Ketiga, arahkan belanja publik ke aset produktif. Dana Desa, APBD, dan program sektoral harus diprioritaskan untuk infrastruktur dan kapasitas

yang benar-benar menambah daya saing: rumah produksi, cold storage kecil, mesin pengolahan, kemasan, sertifikasi, pelatihan digital, jalan usaha tani, irigasi, listrik, internet, dan promosi produk unggulan. Belanja seperti ini jauh lebih memberdayakan dibanding sekadar kegiatan seremoni atau bantuan yang tidak terintegrasi dengan rantai nilai. (djpk.kemenkeu.go.id)

Keempat, lindungi dan monetisasi identitas daerah. Produk yang punya ciri khas perlu didorong menjadi indikasi geografis atau setidaknya merek kolektif yang kuat. Contoh andaliman Samosir, Cengkeh Minahasa, Pala Siau, dan Kopi Kintamani menunjukkan bahwa keaslian daerah dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pemerintah daerah perlu aktif membantu dokumentasi, standardisasi, promosi, dan jejaring pasar produk-produk semacam ini. (dgip.go.id)

Kelima, integrasikan digitalisasi dengan ekonomi nyata. QRIS, marketplace, media sosial, dan sistem pencatatan digital harus dijadikan alat untuk memperluas pasar dan meningkatkan profesionalisme UMKM lokal. Tetapi digitalisasi harus datang bersama mutu produk, kejelasan merek, foto yang baik, kemasan yang layak, dan logistik yang andal. Di sinilah kolaborasi antara dinas, kampus, komunitas kreatif, dan sektor keuangan menjadi penting. (Bank Indonesia)

Keenam, bangun SDM lokal yang kontekstual. Pendidikan vokasi, pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pendampingan tidak boleh abstrak. Ia harus berbasis komoditas dan sektor yang memang hidup di daerah tersebut. Daerah kopi memerlukan keahlian budidaya, pascapanen, roasting, branding, dan wisata kopi. Daerah pesisir memerlukan keahlian budidaya, pengolahan hasil laut, cold chain, dan wisata bahari. Daerah hutan memerlukan agroforestry, pengolahan hasil non-kayu, dan ekowisata. RPJMN 2025–2029 dan World Bank sama-sama menggarisbawahi pentingnya investasi keterampilan yang terhubung dengan produktivitas. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Ketujuh, pastikan keberlanjutan ekologis sebagai prasyarat ekonomi. Daerah harus memahami bahwa hutan, laut, tanah, dan air adalah modal produksi jangka panjang. Perhutanan sosial, ekonomi biru, energi desa berbasis EBT, dan desa adaptif iklim adalah contoh bagaimana keberlanjutan dapat dipadukan dengan pemberdayaan. ESDM menegaskan bahwa program listrik desa dan EBT desa dapat menggerakkan perekonomian lokal, sementara KLHK/Kemenuh menunjukkan bahwa akses legal kelola hutan dapat memperkuat usaha masyarakat secara berkelanjutan. ([Kementerian ESDM](#))

14. Penutup

Pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi daerah melalui sumber daya lokal adalah upaya memulihkan logika dasar pembangunan: bahwa kesejahteraan harus tumbuh dari kapasitas masyarakat mengelola asetnya sendiri. Dalam negara sebesar dan seberagam Indonesia, tidak ada strategi pembangunan yang lebih rasional daripada menjadikan kekuatan lokal sebagai titik tolak. Daerah tidak boleh hanya menjadi tempat produksi bahan mentah atau pasar bagi produk luar; daerah harus menjadi ruang penciptaan nilai, inovasi, dan identitas ekonomi. Data kemiskinan perdesaan, ketimpangan, fokus kebijakan Dana Desa, penguatan perhutanan sosial, dorongan ekonomi biru, hilirisasi komoditas, serta perluasan ekosistem digital semuanya mengarah pada satu kesimpulan: pembangunan yang berkelanjutan harus lebih berakar di wilayah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Maka, ukuran keberhasilan pemberdayaan ekonomi daerah bukan hanya naiknya PDRB atau bertambahnya proyek fisik. Ukurannya adalah apakah petani memperoleh harga yang lebih baik, apakah nelayan memiliki akses pasar yang lebih adil, apakah pengrajin menjual produk dengan identitas yang terlindungi, apakah desa mampu membiayai usaha produktifnya sendiri, apakah anak muda melihat masa depan di kampung halamannya, dan apakah lingkungan tetap lestari sambil

ekonomi bertumbuh. Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu makin positif, maka sumber daya lokal benar-benar telah berubah menjadi kekuatan pembangunan.

Dalam perspektif manajemen pembangunan, sumber daya lokal adalah titik awal; kelembagaan adalah mesin; teknologi adalah akselerator; pasar adalah ruang pertumbuhan; dan keadilan distribusi adalah tujuan moralnya. Pemberdayaan ekonomi daerah yang berhasil adalah ketika semua unsur itu bertemu dalam satu ekosistem yang hidup. Indonesia memiliki bekal besar untuk menempuh jalan tersebut. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan keberanian untuk membangun dari bawah—dari desa, dari komunitas, dari komoditas khas, dari budaya setempat, dan dari sumber daya lokal yang selama ini terlalu sering hanya dilihat sebagai potensi, padahal sesungguhnya ia adalah masa depan. ([JDIH Kementerian Desa](#))

Berikut **glosarium** dan **referensi** yang dapat langsung ditempatkan pada bagian akhir makalah "*Pemberdayaan Ekonomi Daerah melalui Sumber Daya Lokal.*"

Istilah-istilah kebijakan yang spesifik di bawah ini saya sesuaikan dengan konteks dokumen resmi pemerintah, otoritas, dan lembaga pembangunan yang relevan untuk topik tersebut.

(perpustakaan.bappenas.go.id)

Glosarium

Agrologistik

Sistem pendukung distribusi hasil pertanian yang mencakup penyimpanan, transportasi, penanganan pascapanen, dan konektivitas pasar agar produk sampai ke konsumen dengan mutu dan biaya yang

efisien. Dalam pendekatan rantai nilai, agrologistik menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. ([World Bank](#))

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Lembaga usaha desa yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif dan profesional agar manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di wilayah desa. Dalam praktik pembangunan desa, BUMDes sering diposisikan sebagai instrumen penguatan usaha produktif lokal.

Dana Desa

Transfer fiskal dari pemerintah pusat ke desa yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk TA 2025, pagu Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun, dengan fokus antara lain pada kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.

(djpk.kemenkeu.go.id)

Ekonomi Biru

Pendekatan pembangunan ekonomi kelautan dan pesisir yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai dasar peningkatan kesejahteraan. Dalam kebijakan KKP, ekonomi biru dikaitkan dengan ketahanan pangan, hilirisasi hasil perikanan, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. ([KKP](#))

Hilirisasi

Proses mengubah komoditas mentah menjadi produk olahan atau semiolahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi daerah, hilirisasi berarti menahan lebih banyak manfaat ekonomi—pendapatan, kerja, dan pajak—di wilayah asal sumber daya. Bappenas, misalnya, menempatkan hilirisasi kelapa sebagai agenda strategis jangka panjang. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Indikasi Geografis

Tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang kualitas, reputasi, atau

karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis dan/atau pengetahuan lokal. Perlindungan ini penting karena dapat memperkuat identitas daerah, menaikkan nilai jual, dan melindungi produk khas dari peniruan. (dgip.go.id)

KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Unit bisnis yang dibentuk oleh kelompok penerima akses kelola perhutanan sosial untuk mengembangkan usaha berbasis hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun jasa lingkungan. KUPS merupakan jembatan antara akses legal kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. ([Ministry of Environment and Forestry](#))

Nilai Tambah

Kenaikan nilai ekonomi suatu barang atau jasa setelah melalui proses pengolahan, pengemasan, branding, distribusi, atau diferensiasi mutu. Dalam ekonomi daerah, semakin besar nilai tambah yang diciptakan di wilayah asal, semakin besar pula manfaat ekonomi lokal yang tertahan di daerah tersebut. ([World Bank](#))

Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Proses memperkuat kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, dan pemerintah daerah untuk mengelola aset wilayahnya secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya berarti bantuan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapabilitas, akses pasar, organisasi usaha, dan posisi tawar masyarakat lokal.

Perhutanan Sosial

Skema kebijakan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Per awal 2025, akses kelola perhutanan sosial telah mencapai sekitar 8,3 juta hektar dan melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sehingga menjadi salah satu instrumen penting pemerataan ekonomi berbasis sumber daya lokal. ([Ministry of Environment and Forestry](#))

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi digital lintas penyelenggara. Dalam konteks ekonomi daerah, QRIS penting karena membuka jalan bagi UMKM lokal masuk ke ekosistem digital; pada Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 39,3 juta merchant dan 93,16% di antaranya adalah UMKM. ([Bank Indonesia](#))

Rantai Nilai (Value Chain)

Keseluruhan rangkaian aktivitas dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran suatu produk. Pendekatan rantai nilai menekankan bahwa keberhasilan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi oleh keterhubungan seluruh mata rantai tersebut. ([World Bank](#))

Resiliensi Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan seperti fluktuasi harga, krisis iklim, gangguan logistik, atau perubahan pasar. Resiliensi biasanya diperkuat oleh diversifikasi usaha, kelembagaan lokal yang kuat, dan pemanfaatan sumber daya wilayah secara adaptif. ([World Bank](#))

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan pemerintah. RPJMN 2025–2029 menempatkan penguatan potensi lokal, ketahanan pangan, pendidikan vokasi, dan pengembangan produk unggulan desa sebagai bagian dari arah transformasi pembangunan nasional. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Sumber Daya Lokal

Seluruh aset yang dimiliki suatu wilayah, baik yang bersifat alamiah maupun sosial-budaya, seperti lahan, laut, hutan, komoditas khas, keterampilan masyarakat, tradisi produksi, jejaring sosial, dan identitas daerah. Dalam pembangunan modern, sumber daya lokal juga mencakup kapasitas digital dan kelembagaan usaha.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kelompok usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia, UMKM merupakan mayoritas merchant QRIS, sehingga digitalisasi UMKM menjadi salah satu pintu penting pemberdayaan ekonomi daerah. ([Bank Indonesia](#))

Vokasionalisasi / Pendidikan Vokasi Kontekstual

Pendekatan pendidikan dan pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan sektor riil daerah, misalnya pertanian, perikanan, pengolahan pangan, pariwisata, atau ekonomi kreatif lokal. RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan vokasi yang selaras dengan potensi wilayah. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (tanpa tahun). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2025, 15 Januari). *BI-Rate Turun 25 bps Menjadi 5,75%*. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2025, 4 Agustus). *QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya*. ([Bank Indonesia](#))

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (tanpa tahun). *Listing Indikasi Geografis Terdaftar*. (dgip.go.id)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, 24 April). *Pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis Andaliman Pulo Samosir: Upaya pelestarian dan perlindungan kekayaan hayati lokal*. (dgip.go.id)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, 26 Februari). *Indikasi geografis sebagai pilar ekonomi: Strategi perlindungan dan optimalisasi.* (dgip.go.id)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 6 Januari). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.* (djpk.kemenkeu.go.id)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* ([JDIH Kementerian Desa](http://jdih.kemdes.go.id))

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 27 Mei). *KKP libatkan pemda implementasikan ekonomi biru untuk ketahanan pangan.* ([KKP](http://kkp.go.id))

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025, 4 Februari). *Agroforestry perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan.* ([Ministry of Environment and Forestry](http://kementerian.lhkg.go.id))

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029.* (perpustakaan.bappenas.go.id)

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045.* (perpustakaan.bappenas.go.id)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, 2 September). *Peningkatan akses listrik desa jadi prioritas pemerintah, menjangkau 1,2 juta rumah tangga.* ([Kementerian ESDM](http://kementerian.esdm.go.id))

World Bank. (2022). *Indonesia Agriculture Value Chain Development Project (ICARE).* ([World Bank](http://worldbank.org))

World Bank. (2024, Desember). *Indonesia Economic Prospects: Funding Indonesia's Vision 2045*. ([World Bank Docs](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 2 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a5583a-2e8c-839a-a4a3-2607ba2bd1cb>